

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik Suriah dimulai sejak 6 Maret 2011, diawali dengan adanya protes-protes demonstran pasca Kebangkitan Dunia Arab (*Arab Spring*). Gelombang demonstrasi pro-demokrasi menyebar ke seluruh penjuru Suriah terutama di kota Deraa, Suriah (Kuncahyono, 2012). Konflik Suriah meningkat ke konflik bersenjata setelah pemerintah Bashar Al-Assad melakukan tindakan kekerasan pada demonstran yang menginginkan dirinya untuk mundur dari kursi kepresidenan. Rezim Bashar Al-Assad secara terang-terangan mengirim senjata dan pasukan militernya untuk menindas demonstran.

Masyarakat tidak puas dengan tindakan pemerintah dan menilai pemerintah Suriah melanggar hak asasi manusia, akibatnya beberapa tentara membelot dari pemerintah dan bergabung dengan warga sipil membentuk kelompok oposisi *Free Syrian Army* (FSA) untuk menggulingkan pemerintahan Bashar Al-Assad.

Rezim Suriah saat ini terdiri dari dua kubu. Kubu garis keras yang memilih menggunakan kekuatan militer dalam menyelesaikan konflik di Suriah dan kubu moderat yang menuntut adanya pemilu yang demokratis dan memberikan imbalan berupa perlindungan hukum bagi presiden yang mengundurkan diri (Kompas, 2012). Namun pemerintah Bashar Al-Assad lebih memilih kebijakan kubu garis keras, yaitu menggunakan kekuatan militer untuk meredam gejolak masyarakat yang menginginkan runtuhnya rezim Bashar Al-Assad.

Hingga saat ini, dilansir dalam situs IAmSyria, korban akibat konflik di Suriah sudah mencapai angka 470.000 korban jiwa dan 55.000 diantaranya adalah anak-anak.

Sebanyak 63.41% merupakan warga sipil dan 36.59% non-sipil (JamSyria.org, 2017). Sebagian besar kematian yang terjadi adalah hasil serangan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah.

Di sisi lain, Arab Saudi merupakan negara Islam yang masih bertahan dengan sistem pemerintahan monarki absolut (Zakaria, 2013), berjanji untuk menjadi negara Islam moderat dan terbuka. Arab Saudi juga melakukan kerjasama untuk mencegah adanya radikalisme dan pendanaan terhadap tindakan terorisme yang merupakan suatu kewajiban bagi Arab Saudi untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan sebagai negara yang paling berpengaruh (Kompas, 2017). Arab Saudi berperan aktif dalam setiap konflik-konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah agar tidak meluas. Salah satu peran yang dimainkan Arab Saudi dalam upaya nya tersebut adalah keikutsertaan nya dalam konflik Suriah.

Arab Saudi merupakan negara pertama terlibat dan merespon agresif peristiwa konflik internal Suriah tersebut. Hal ini bermula dengan pernyataan resmi Arab Saudi melalui Raja Abdullah dengan menyatakan bahwa pemerintah Suriah sebagai mesin pembunuh dan meminta masyarakat Suriah untuk menentang atas apa yang telah terjadi terhadap korban demonstran, dan dilanjutkan dengan penarikan duta besar Arab Saudi di Suriah (Tjarsono, 2015).

Sebagai negara yang ingin membawa perdamaian di Suriah, Arab Saudi berusaha memaksimalkan kepentingan negaranya di tengah konflik yang terjadi di Suriah melalui Liga Arab yang mereka dominasi (Ardiyanto, 2014). Sehingga dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Liga Arab, Arab Saudi memegang peran besar didalam setiap pengambilan keputusan tersebut.

Liga Arab mengangkat isu kekerasan oleh pemerintah Suriah ke PBB dan mengajukan resolusi intervensi militer dan mengajak negara-negara lain untuk terlibat dalam menyelesaikan konflik di Suriah (Ikhsan, 2015). Namun pada

4 Februari 2014 PBB menolak resolusi yang ditawarkan Liga Arab. Alasannya, intervensi yang pernah dilakukan oleh NATO di Libya tidak bisa diterapkan di Suriah (Tjarsono, 2015). Dunia internasional lebih memilih resolusi penyelesaian masalah menggunakan jalur diplomasi yang damai.

Walaupun didalam kawasan Arab Saudi dianggap berhasil menekan Suriah dengan dominasinya di Liga Arab, tetapi di dunia internasional upaya mereka terhambat karena ada Rusia dan Tiongkok yang kerap menggunakan hak veto untuk menggagalkan resolusi yang ditawarkan oleh Liga Arab di PBB. Mereka menganggap bahwa intervensi hanya akan memperburuk keadaan dan menghambat proses perdamaian di Suriah.

Meskipun resolusi intervensi militer yang diajukan Arab Saudi di PBB gagal, dilaporkan bahwa Arab Saudi dan Qatar secara diam-diam membiayai pembentukan dan menyalurkan persenjataan kepada kelompok oposisi *Free Syrian Army* melalui Turki pada tahun 2012 (BBC, 2013). Hingga saat ini, bantuan militer lainnya seperti tentara, kendaraan lapis baja dan pesawat tempur terus diberikan Arab Saudi sebagai upaya menciptakan perdamaian di tanah Suriah.

Selain bantuan militer, pada tahun yang sama, Syekh Al Arifi advokad dan perwakilan dari gerakan dukungan Arab Saudi terhadap oposisi Syria Arab Saudi terus melakukan penggalangan dana untuk mebantukan kelompok oposisi di Suriah. Hingga tahun 2016, Arab Saudi telah meningkatkan bantuan untuk rakyat Suriah mencapai 780 juta US Dollar. Selain itu, Arab Saudi juga menyediakan tempat tinggal, akomodasi, pendidikan dan layanan kesehatan gratis bagi pengungsi Suriah (SindoNews, 2016).

Tindakan pemerintah Arab Saudi menimbulkan pertanyaan serta pandangan skeptis dari dunia internasional, sebab Arab Saudi sebagai negara yang paling berpengaruh di kawasan, menginginkan Bashar Al-Assad segera digulingkan

(Ardiyanto, 2014). Pemerintah Arab Saudi juga terbukti telah memberikan bantuan terhadap kelompok oposisi Suriah berupa persenjataan berat. Hal ini bertentangan dengan peran Arab Saudi sebagai negara Islam yang menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Timur Tengah.

B. Rumusan Masalah

Mengapa Arab Saudi mendukung kelompok oposisi *Free Syrian Army* dan *Syrian National Council* dalam konflik yang terjadi di Suriah?

C. Kerangka Teori

Konsep Kepentingan Nasional

Dalam kepentingan nasional peran ‘negara’ sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut. Seorang ahli, Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatas (Sorensen, 2009). Sehingga ruang gerak yang dimiliki oleh suatu bangsa menjadi kontrol dari sebuah negara.

Kepentingan Nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan suatu negara atau sehubungan dengan hal yang di cita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan.

Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*). Kepentingan nasional diidentikan dengan "tujuan nasional". Kepentingan nasional sering dijadikan tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan masing-masing negara sebelum memurumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap kebijakan luar negeri (*foreign policy*) perlu dilandaskan kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai "Kepentingan Nasional" (Rudy, 2002).

Menurut Jack O. Plano dan Ray Olton, prioritas kepentingan nasional setiap negara berbeda antara negara satu dengan negara lainnya, tergantung kepada kebutuhan negara yang bersangkutan. Namun para ahli cenderung menempatkan masalah *survival* dan *self preservation* sebagai prioritas utama. Kepentingan nasional merupakan tujuan dan faktor mendasar untuk merumuskan politik luar negeri suatu negara sehingga, kepentingan nasional adalah kebutuhan vital bagi suatu negara (Jiball, 2013).

Setiap kebijakan luar negeri suatu negara mendasarkan pada kepentingan nasional yang bersangkutan. Kepentingan nasional seringkali dipakai sebagai alat analisa dan untuk mengetahui tujuan kebijakan luar negeri suatu negara. Paul Seabury mendefinisikan konsep kepentingan nasional dalam dua aspek, yakni *normatif* dan *deskriptif*. Secara normatif, konsep kepentingan nasional mengacu pada serangkaian tujuan ideal yang seharusnya diusahakan untuk diwujudkan oleh suatu bangsa dalam hubungannya dengan negara lain. Secara deskriptif, konsep kepentingan nasional dapat dianggap sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui kepemimpinannya dengan perjuangan yang gigih (Holsti, 1988).

Kepentingan nasional merupakan kepentingan subjektif dalam mewujudkan cita-cita suatu negara, yang dalam perkembangan, kepentingan nasional memiliki klasifikasi tertentu untuk mendapatkan power berupa kontrol

danantisipasi suatu negara atas negara lain. Menurut K.J. Holsti mengidentifikasi kepentingan nasional ke dalam 3 klasifikasi (Holsti, 1988).

Pertama, *Core Values* adalah kepentingan inti yang merupakan kepentingan jangka pendek, kepentingan ini merupakan suatu yang dianggap paling vital bagi negara sebagai usaha yang harus segera di wujudkan karena tidak mungkin untuk mencapai tujuan lain yang semakin jauh karena menyangkut eksistensi suatu negara.

Kedua, *Middle Range Objectives* adalah kepentingan jangka menengah, kepentingan ini merupakan kebutuhan suatu negara untuk memperbaiki derajat perekonomiannya melalui tindakan internasional. Suatu negara juga melakukan usaha peningkatan kekuatan yang saat ini diukur dari bidang industri dan teknologi. Kepentingan ini juga menjadi bentuk perluasan diri yang tidak selalu tentang suatu negara menduduki negara lain, melainkan mencari keuntungan dengan cara memiliki akses pada bahan mentah, pasar dan rute perdagangan yang tidak bisa mereka peroleh dari perdagangan biasa dan diplomasi.

Ketiga, *Long Range Goals* merupakan kepentingan jangka panjang yang bersifat ideal tentang impian dan keinginan suatu negara dalam partisipasinya di dunia internasional. Kepentingan ini umumnya sebagai upaya mempertahankan kekuatan dan kestabilan suatu negara di dunia internasional.

Dalam konteks dukungan Arab Saudi terhadap kelompok oposisi Suriah, teori kepentingan nasional yang diidentifikasi oleh K.J Holsti sesuai dengan dasar tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. *Core values* merupakan kepentingan jangka pendek dan merupakan faktor paling vital bagi Arab Saudi karena dalam hal ini Arab Saudi berusaha untuk mempertahankan eksistensinya di Timur Tengah. *Middle range objectives* merupakan kepentingan ekonomi Arab Saudi untuk menguasai perdagangan minyak dan gas di

Timur Tengah. *Long range goals* merupakan sesuatu yang bersifat ideal, dalam hal ini kepentingan Arab Saudi untuk menguatkan legitimasi dan kekuasaan Sunni di Timur Tengah.

Teori Sekuritisasi

Perubahan kajian keamanan tradisional menuju non-tradisional dipelopori oleh Barry Buzan, Ole Waever dan beberapa kelompok pemikir yang tergabung dalam *Copenhagen School*. Salah satu pemikiran yang paling berkontribusi dan khas dari Copenhagen School adalah *Societal Security* (keamanan masyarakat) dan *Securitization* (Sekuritisasi).

Penggunaan teori sekuritisasi atau *Securitization* dalam keamanan dan perluasan isu ancaman dapat dilihat dari dasar kerangka analisis Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde dalam tulisan *Security: A New Framework of Analysis*. Keamanan adalah langkah yang dilakukan dengan melampaui aturan main secara umum dalam membingkai suatu isu apakah isu tersebut termasuk dalam ranah politik atau melampauinya. Sedangkan Sekuritisasi merupakan bentuk ekstrim dari upaya politik. Menurut Barry Buzan, sekuritisasi melihat bahwa masalah keamanan merupakan hasil konstruksi. Menurutnya, suatu isu menjadi permasalahan karena adanya faktor-faktor yang memberikan pengaruh. Terdapat aktor yang mewacanakan bahwa isu tersebut merupakan ancaman eksistensial bagi suatu entitas. Dengan demikian suatu isu menjadi masalah bukan karena pada dasarnya isu tersebut berbahaya atau dianggap sebagai ancaman, melainkan karena hasil promosi para aktor. Secara sederhana, konsep masalah keamanan muncul karena pengaruh konstruksi hubungan antar subyek yaitu *aktor* dan *audiens* dimana aktor mewacanakan isu dan *audiens* menyetujuinya (Bary Buzan, 1998) sehingga disebut sekuritisasi.

Aktor melakukan sekuritisasi apabila suatu isu dinilai sangat mendesak. Terdapat klasifikasi untuk menentukan isu keamanan, yaitu *pertama*, isu publik dimana negara tidak

mengambil tindakan terhadap isu tersebut. *Kedua*, politisasi dimana isu yang ada dimasukkan sebagai input dalam suatu kebijakan. *Ketiga*, Sekuritisasi dimana negara menangani isu melalui tindakan cepat bahkan cenderung "melanggar" aturan hukum yang ada.

Selanjutnya dalam melakukan analisa keamanan menurut Buzan, proses sekuritisasi memiliki beberapa peran penting didalamnya, yaitu *securitizing actors* sebagai aktor yang melakukan sekuritisasi, *speech act* atau tindakan aktor dalam rangka melakukan sekuritisasi, *existential threat* yaitu ancaman eksistensial yang diwacanakan oleh si aktor akan muncul dari isu tersebut, *referent objects* entitas yang akan terancam dengan adanya isu tersebut jika tidak ditangani secara serius seperti sektor keamanan militer, ekonomi, politik, sosial dan lingkungan, dan *audience* yang merupakan masyarakat adalah pihak-pihak yang coba dipengaruhi oleh si aktor agar mempercayai adanya ancaman eksistensial. Pihak *securitizing actor* yaitu aktor pemimpin politik, birokrasi, pemerintah, pelobi, dan kelompok penekan (McGahan, 2009).

Gambaran sederhana dari sekuritisasi adalah mengacu pada proses menanggapi masalah yang dianggap sebagai ancaman eksistensial. Setelah dilakukan sekuritisasi, isu akan memunculkan gambaran tentang ancaman, musuh dan pertahanan, sehingga negara diberikan peran penting untuk mengatasinya. Sehingga, isu politik yang terkandung didalamnya hanya akan dilihat sebagai politik biasa. Walaupun sekuritisasi menekankan pada tindakan atau *speech acts*, yaitu istilah yang dilakukan *Securitizing Actor* terhadap suatu isu yang dinilai sebagai ancaman. Namun aktor tersebut harus bisa membingkai isu dan meyakinkan *audiences* bahwa *referent objects* terancam. Di sisi lain, aktor memiliki *existential threat* yang harus segera diatasi karena menyangkut keamanan pihaknya (Chadrawaty, 2002). Aktor politik memerlukan dukungan dari masyarakat agar tercipta tindakan sah yang sesuai. Sehingga, isu ancaman akan menciptakan sebuah repon kebijakan.

Dalam penelitian penelitian ini, penulis melihat Arab Saudi berperan sebagai *Security actor*. *Speech act* dilakukan melalui bantuan-bantuan militer maupun kemanusiaan kepada oposisi pemerintah Suriah serta tekanan melalui forum Liga Arab dan PBB. *Referent object* yaitu permasalahan keamanan dan stabilitas kawasan yang akan diakibatkan oleh konflik Suriah dan *existential threat* adalah hegemoni Sunni Arab Saudi yang terancam akibat meluasnya ajaran Syiah yang dibawa oleh Iran, sedangkan *audience* adalah masyarakat, negara-negara kawasan dan dunia internasional.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, muncul hipotesa tentang kepentingan politik Arab Saudi memberikan dukungan terhadap kelompok oposisi Suriah, yaitu :

Arab Saudi memiliki kepentingan untuk mempertahankan power dan eksistensinya di kawasan Timur Tengah karena konflik di Suriah dianggap tanggung penentuan bagi Arab Saudi dan Iran sebagai negara *major power* di kawasan Timur Tengah. Arab Saudi berupaya meredam kekuatan dan legitimasi hegemoni Syiah yang dibawa oleh Iran dan mengembalikan kestabilan kawasan dibawah kekuasaan Sunni.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan politik dibalik dukungan Arab Saudi terhadap kelompok oposisi dalam konflik Suriah. Sebagai negara dengan penganut Sunni terbesar di Timur Tengah, Arab Saudi mencoba meredam hegemoni Syiah yang dibawa oleh negara rivalnya yaitu Iran melalui usahanya memenangkan konflik di Suriah.

Serta melihat bagaimana upaya Arab Saudi dalam penyelesaian konflik Suriah.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian diperlukan agar pembahasan yang dibahas tidak menyimpang terlalu jauh agar memudahkan penulis dalam menganalisa dan memahami permasalahan yang ada. Adapun masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah kepentingan Arab Saudi dibalik dukungan terhadap kelompok oposisi dalam konflik di Suriah.

Penulisan skripsi ini dimulai sejak bermulanya fenomena Arab Spring pada tahun 2011 yang merupakan masa transisi demokrasi di berbagai Timur Tengah yang menuntut pemerintah diktatornya untuk lengser, hingga akhirnya berimbas ke Suriah yang membuat masyarakat menuntut presiden Bashar Al-Assad untuk turun jabatan. Lalu sikap Arab Saudi terhadap konflik Suriah dan bantuan yang diberikan terhadap kelompok oposisi pemerintah Suriah. Rentang waktu yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini dimulai sejak tahun 2011 sampai dengan 2016.

G. Metodologi Penelitian

1. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif, dimana penulis mencoba menggambarkan dan menjelaskan kepentingan Arab Saudi dalam campur tangannya dalam konflik Suriah.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data tentang pengambilan keputusan dibalik campur tangan Arab terhadap konflik Suriah didapat dari sumber berupa buku, jurnal, dokumen dan bahan dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah dan kajian pustaka (*library research*), yaitu penulis membaca, menelaah, membandingkan serta menganalisa data dan informasi yang dikumpulkan dari literature yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Selain itu, juga mengunjungi beberapa situs di internet untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan penulis.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini direncanakan akan disajikan dalam pembahasan menurut pembagian bab-bab sebagai berikut :

BAB 1, merupakan bab pendahuluan yang berisikan aturan-aturan baku penulisan ilmiah yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, kernaagka pemikiran, hipotesa, dan sistematika penulisan.

BAB 2, merupakan gambaran umum penelitian. Pada bab ini akan menjelaskan Gambaran umu konflik yang terjadi di Suriah dibawah rezim Bashar Al-Assad

BAB 3, Pada bab ini merupakan temuan data. Pada bab ini akan dijelaskan keterlibatan pemerintah Arab Saudi dalam konflik Suriah

BAB 4, Pada bab ini akan menjelaskan tentang kepentingan politik Arab Saudi mendukung kelompok oposisi Suriah dalam upaya melengserkan pemerintah Bashar Al-Assad.

BAB 5, merupakan penutup dan berisi tentang kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan paparan atau dekripsi fakta-fakta dan saran atau preskripsi yang konstruktif.